

Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Merencanakan Pembangunan di Kabupaten Bone

A. Magfirah Maulani^{1*}, Muh. Isa Ansyari², Sudarmi³

- 1)Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 2)Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 3)Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to find out the Strategy of the Regional Development Planning in Bone Regency and to know the supporting and inhibiting factors in the process of the regional development planning strategy. Data collection techniques used observation, interview with 4 informants and documentation . Data analysis used interactive analysis models and 3 types of triangulation in data validation. The results of this study showed that the strategy in planning development had been carried out optimally, this was seen from the perspective of organizational policy the ability could describe the strategy , Employee Motivation could work productively based on their ability, but in terms of the location of resources still not run well because of insufficient material resources. Supporting factors in this planning strategy were (a) Organizational Policy and Development Policy, and (b) Potential and Productivity. Then the inhibiting factors were (a) HR Empowerment and (b) Material Resources.

Keywords: *strategy, development planning agency*

Abstrak

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Merencanakan Pembangunan Di Kabupaten Bone serta mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya dalam proses strategi perencanaan pembangunan daerah tersebut. Informan yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 4 orang dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisa interaktif serta menggunakan 3 jenis triangulasi dalam pengabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dalam merencanakan pembangunan telah terselenggara secara optimal, hal ini dilihat dari sisi kebijakan organisasi kemampuan untuk menjabarkan strategi sudah mampu, Motivasi Pegawai terus bekerja secara produktif dan sesuai kemampuan, tetapi dari segi lokasi sumber daya masi belum berjalan karena sumber material tidak mencukupi. Faktor pendukung dalam Strategi perencanaan ini ialah (a) Kebijakan Organisasi dan Kebijakan Pembangunan, serta (b) Potensi dan Produktifitas. Kemudian Faktor penghambat yaitu (a) Pemberdayaan SDM dan (b) Sumber daya Material.

Kata Kunci : strategi, badan perencanaan pembangunan

* magfiramaulani@gmail.com

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 13 ribu pulau, yang terbentang dari sabang sampai merauke. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan provinsi tersebut dibagi lagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Oleh karena itu untuk menjangkau keseluruhan pelosok tanah air agar pembangunan dapat merata perlu dikembangkan yang sesuai dan serasi dengan kebutuhan daerah. Negara Republik Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan dalam segala bidang demi mencapai cita-cita nasional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, selanjutnya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai yang dinyatakan dalam pembukaan UUD 1946.

Pembangunan daerah memerlukan tenaga yang cukup giat dan kecerdasan yang dimiliki oleh para pemimpinnya sehingga pembangunan yang dilaksanakan berjalan maksimal dan tenaga yang dibutuhkan pula memerlukan mental yang cukup kuat

demi membangun bangsa yang tertata, pembangunan tersebut tidak akan berjalan lancar apabila sistem pemerintahannya tidak dibenahi sedemikian rupa. Sebagaimana pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan integral dari pembangunan nasional yang tidak dapat dilepaskan dari prinsip otonomi daerah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Pembangunan daerah adalah seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotongroyong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Disinilah peran strategi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah sesuai dengan visi misi kepala daerah melalui penentuan program atau kebijakan berdasarkan potensi wilayah, permasalahan maupun isu strategi yang ada.

Manajemen strategi memberikan pengaruh terhadap jalannya organisasi dan bagaimana kontribusinya terhadap keberhasilan dan kegagalan perusahaan. Kehadiran manajemen strategi dalam khasanah ilmu manajemen merupakan isu penting yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang dengan memperhatikan berbagai unsur yang dimiliki oleh organisasi. Manajemen strategi adalah cara yang akan dilakukan para penyusun strategi menentukan tujuan dan membuat keputusan strategik sehingga tujuan dan sasarannya tercapai (Akdon, 2011:7). Sasaran manajemen strategi adalah meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi penganggaran, penggunaan sumber daya, kualitas evaluasi program dan pemantauan kinerja serta kualitas pelaporan. Akdon (2011:277) merumuskan bahwa manajemen strategi adalah suatu seni dan ilmu dari pembuatan (*formulating*), penerapan (*implementing*), dan evaluasi (*evaluating*) keputusan-keputusan strategi antar fungsi-fungsi yang

memungkinkan organisasi mencapai tujuan-tujuannya masa datang. Dengan demikian, manajemen strategi itu terdiri dari tiga macam proses manajemen yaitu pembuatan strategi, penerapan strategi, dan atau kontrol terhadap strategi. Pembuatan strategi meliputi pengembangan misi dan tujuan jangka panjang, pengidentifikasian peluang dan ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan pada organisasi, pengembangan alternatif strategi meliputi penentuan sasaran operasional tahunan, dan penentuan strategi yang sesuai untuk diaplikasikan. Penerapan strategi meliputi kebijakan organisasi, memotivasi pegawai, dan mengalokasikan sumber daya (SDM dan Non SDM) agar strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan. Sedangkan evaluasi strategi meliputi upaya-upaya yang dilakukan untuk memonitor seluruh hasil dari pembuatan dan penerapan termasuk mengukur kinerja organisasi serta mengambil langkah koreksi bila diperlukan.

Strategi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *strategos* atau *stretaus* dengan kata jamak *strategi*. *Strategos* sendiri memiliki generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang (Salusu, 2006 :84). Penggunaan kata *Strategos*

itu dapat diartikan sebagai perencanaan dan pemusnahan musuh-musuh dengan menggunakan cara yang efektif berlandaskan sarana-sarana yang dimiliki (Brecker dalam Heene dkk, 2010:53) Definisi strategi pertama yang dikemukakan oleh Jauch & Glueck (dalam Akdon, 2011:13) menyebutkan bahwa Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi organisasi dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Strategi didefinisikan sebagai suatu proses peentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Marrus (2002:31).

Strategi merupakan garis besar atau pedoman pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi tersebut maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan sendiri menurut Akdon (2011:154) adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Berdasarkan buku SAKIP LAN-RI dalam Akdon (2011:155) disebutkan bahwa elemen penting dalam menyikapi

kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi ke dalam kebijakan-kebijakan yang cocok, dapat dilaksanakan, dan tidak hanya baik secara teoritis. Kebijakan organisasi dapat berupa tindakan, cara/langkah, program-program dan kegiatan-kegiatan organisasi.

Menurut Hasibuan (2005:92) motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan. Artinya motivasi mempersoalkan bagaimana caranya menggerakkan daya dan potensi seseorang supaya mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pentingnya memotivasi pegawai karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku pegawai supaya mau bekerja giat dan antusias dalam mencapai hasil yang maksimal.

Menurut Silalahi (2011:237), sumber daya merupakan aset, baik berupa orang dengan keterampilan dan pengetahuannya, modal finansial, fisik, serta hal-hal yang bersifat intanjibel termasuk faktor struktur dan kultural yang digunakan organisasi untuk memenuhi satu kebutuhan dan

memecahkan masalah. Sumber daya dapat dikelompokkan atas sumber daya manusia (*human resources*) dan sumber daya non manusia (*nonhuman resources*) atau sumber daya material (*material resources*). Sumber daya manusia dinamakan juga sebagai tenaga kerja (*workforce* atau personalia (*personnel*) merupakan orang yang bekerja untuk mencapai tujuan organisasional (Silalahi, 2011:238). Menurut Silalahi (2011:242), sumber daya manusia merupakan aset terpenting dari organisasi dibandingkan dengan elemen lainnya. Manusia dalam organisasi memiliki peran dan fungsi penting bagi terwujudnya tujuan organisasi.

Kata strategi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *strategos* atau *stretaus* dengan kata jamak *strategi*. *Strategos* sendiri memiliki generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang (Salusu, 2006 :84). Penggunaan kata *Strategos* itu dapat diartikan sebagai perencanaan dan pemusnahan musuh-musuh dengan menggunakan cara yang efektif berlandaskan sarana-sarana yang dimiliki (Brecker dalam Heene dkk, 2010:53)

Definisi strategi pertama yang dikemukakan oleh Jauch & Glueck (dalam Akdon, 2011:13) menyebutkan bahwa Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi organisasi dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Strategi didefinisikan sebagai suatu proses peentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Marrus (2002:31).

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan pendapatan masyarakat secara keseluruhan sebagai cerminan kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang tercipta di suatu wilayah. Sedangkan pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan dalam struktur, sikap dan faktor kelembagaan, juga percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakadilan dan penghapusan kemiskinan absolut. Tujuan pembangunan daerah adalah

meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode tahun 2015-2019 pembangunan daerah diarahkan untuk penguatan daerah dan masyarakatnya, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di daerah untuk mendorong pengembangan daerah yang berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan antara daerah-kota.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana kita ketahui bahwa perencanaan

pembangunan daerah mengacu kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti Undang-undang No.25 Tahun 2014 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, peraturan pemerintah No.8 Tahun 2018, dan yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Di dalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Jadi dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. Strategi itu juga menampakkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut Grand Strategy yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi.

Pertanyaan apa yang menjadi bisnis atau urusan kita dan bagaimana kita mengendalikan bisnis itu, tidak semata-mata untuk dijawab oleh organisasi bisnis, tetapi juga oleh setiap organisasi pemerintahan dan organisasi nonprofit. Apakah misi universitas yang utama? Apakah misi yayasan ini, yayasan itu, apakah misi lembaga ini, lembaga itu? Apakah misi utama direktorat jenderal ini, direktorat jenderal itu? Apakah misi badan ini, badan itu? Begitu seterusnya. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu sangat penting dan kalau keliru dijawab bisa fatal. Misalnya, kalau jawaban terhadap misi universitas ialah terjun kedalam dunia bisnis agar menjadi kaya maka akibatnya bisa menjadi buruk, baik terhadap anak didiknya, terhadap pemerintah, maupun terhadap bangsa dan negaranya. Bagaimana misi itu dijalankan juga penting. Ini memerlukan keputusan-keputusan strategik dan perencanaan strategik yang selayaknya juga disiapkan oleh setiap organisasi.

Tingkat-tingkat strategi itu merupakan kesatuan yang bulat dan menjadi isyarat bagi setiap pengambil keputusan tertinggi bahwa mengelola organisasi tidak boleh dilihat dari sudut kerapian administratif semata, tetapi juga hendaknya memperhitungkan soal kesehatan organisasi dari sudut

ekonomi. Pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga tipe strategi yaitu strategi manajemen, strategi investasi dan strategi bisnis. Proses pengembangan strategi dimulai dari pengembangan strategi korporat dengan fokus mempertahankan hidup (*survival*).

Perusahaan harus menentukan persepsi konsumen mengenai kualitas yang diharapkan. Ia juga harus merumuskan secara jelas kebijakan serta prosedur untuk mencapai kualitas seperti yang diharapkan oleh konsumen agar ia dapat bersaing untuk memperoleh keunggulan bersaing. Misalnya keunggulan bersaing dalam hal desain yang fleksibel, kualitas yang baik dan konsisten, kecepatan pelayanan, harga relatif rendah, dan variasi produk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. dengan tipe penelitian fenomenologi. Untuk kebutuhan pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data primer yaitu data empiris yang diperoleh dari

informan berdasarkan hasil wawancara. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Kepala Kantor BAPPEDA Kabupaten Bone, Sekretaris Bappeda Kabupaten Bone, Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian terkait Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Merencanakan Pembangunan di Kabupaten Bone. Dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dan dalam menganalisis data digunakan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk pengabsahan data digunakan tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi perencanaan, monitoring, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan dibidang sosial, budaya maupun ekonomi.

Perencanaan yaitu penyusunan rencana pembangunan daerah dan penganggarannya, baik antar waktu sektor maupun wilayah. Monitoring yaitu pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Sebagaimana pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan integral dari pembangunan nasional yang tidak dapat dilepaskan dari prinsip otonomi daerah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bone terletak di jalan Jend.Ahmad Yani NO.1, Watampone dengan kode pos 92713, yang merupakan suatu akses padat karena menghubungkan jalur jalan ke kecamatan-kecamatan baik itu jalur ke Bone Barat, Bone Selatan dan Bone Utara. Kawasan ini tepatnya berada pada lingkup kecamatan Tanete

Riattang barat, Kabupaten Bone. Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tepat nya berada disebelah kiri kantor Bupati Bone.

Manajemen Strategi merupakan cara yang akan dilakukan para penyusun strategi menentukan tujuan dan membuat keputusan strategik sehingga tujuan dan sasarannya tercapai. Sasaran manajemen strategi adalah meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi penganggaran, penggunaan sumber daya, kualitas evaluasi program dan pemantauan kinerja serta kualitas pelaporan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bone dalam hal ini Badan Pembangunan Daerah yang diharapkan bisa dan mampu menyederhanakan apa prosedur pembangunan daerah terbaik kepada masyarakat. Wujud dari pemanfaatan hal tersebut adalah dengan adanya pembangunan daerah yang merata di Kabupaten Bone. Peneliti akan membahas bagaimana strategi pembangunan daerah, yang meliputi indikator (1) Kebijakan organisasi, yang didalamnya terdapat : (a) Kemampuan untuk menjabarkan strategi, (b) kebijakan pembangunan. Selanjutnya dalam indikator (2) Motivasi pegawai, yang didalamnya terdapat : (a) Potensi, (b) Produktivitas. Dan indikator terakhir (3) Alokasi sumber daya, yang

didalamnya terdapat : (a) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, (b) Sumber daya material. Adapun pembahasan secara rinci mengenai hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

Kemampuan Untuk Menjabarkan Strategi

Kemampuan untuk menjabarkan strategi yang digunakan dalam merencanakan pembangunan daerah di Kabupaten Bone dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan pembangunan daerah maupun yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap beberapa informan yang bersangkutan terkait dengan aspek kemampuan menjabarkan strategi maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan dalam membuat suatu perencanaan pembangunan yaitu tidak terlepas dari peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Kebijakan Pembangunan

Kebijakan pembangunan daerah yang diterapkan di kabupaten bone tidak terlepas dari peraturan pemerintah yang telah ditetapkan, Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pendapat informan diatas terkait dengan kebijakan pembangunan daerah di Kcamatan Bone maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan dilaksanakan atas

peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti RPJPD, RPJMD dan RKPD, dan dari kebijakan tersebut pemerintah Bappeda Kabupaten Bone merencanakan pembangunan di Kabupaten Bone yang merata dan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah, namun hingga saat ini pembangunan daerah di Kabupaten Bone dinilai masih belum merata.

Potensi

Potensi yang dimiliki pegawai mengacu pada bagaimana kemahiran pegawai dalam bekerjasama secara produktif, potensi pegawai juga dapat dilihat dari perilaku sehari-hari sesuai kemampuan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan dari beberapa keterangan informan yang bersangkutan terkait aspek potensi maka secara umum peneliti menganalisa dan menyimpulkan bahwa potensi yang dimiliki oleh pegawai di Kantor Bappeda Kabupaten Bone sudah memiliki potensi, namun tenaga kerja yang ada di Kantor Bappeda Kabupaten Bone jumlahnya masih sangat terbatas, baik itu tenaga kerja PNS maupun Non PNS sehingga kemampuan untuk mengolah data perencanaan pembangunan juga masih terbatas.

Produktifitas

Produktifitas berkaitan dengan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Terkait dengan produktifitas pegawai maka pegawai harus mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, Peneliti kemudian menganalisa dan menyimpulkan keterangan dari setiap informan terkait dengan aspek-aspek yang ada dalam indikator Produktifitas, bahwa secara umum hal tersebut dinilai belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan sesuai namun indikator dari setiap aspek kebanyakan sesuai dan berjalan namun masih ada yang kurang sesuai seperti kinerja pegawai dalam bekerja masih kurang disebabkan kurangnya SDM yang dapat bekerja dengan maksimal.

Perberdayaan SDM

Pemberdayaan SDM dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten bone harus mampu bekerja untuk mencapai tujuan pembangunan daerah berupa pengalokasian sumberdaya, Berdasarkan beberapa keterangan yang dihimpun dari informan terkait dengan aspek Pemberdayaan SDM dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia yang dapat bekerja dinilai sangat kurang dan hal tersebut sangat mempengaruhi kinerja pegawai,

baik itu dalam hal membuat dokumen perencanaan dan pencapaian tujuan, dan kapasitas yang dimiliki pegawai berbeda disebabkan oleh tingkat pendidikan yang berbeda.

Sumber Daya Material

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki sumber daya material yang mampu mengembangkan dan mewujudkan pembangunan daerah yang merata dengan pengalokasian sumber daya. Dari beberapa pendapat informan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa Sumber Daya Material dalam hal ini pembangunan daerah di Kabupaten Bone masih belum merata disebabkan oleh daerah Kabupaten Bone yang cukup luas dan memiliki sekita 27 kecamatan, dan dari sumber dana APBD yang dimiliki dinilai kurang untuk pembangunan daerah yang merata, maka dari itu pembangunan daerah yang merata membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga hal tersebut mempengaruhi kemampuan Bappeda itu sendiri dalam merencanakan pembangunan daerah yang merata, seperti pada pembangunan lapangan kerja untuk masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang hanya sampai SD, SMP maupun SMA.

Faktor Pendukung merupakan hal-hal yang mendukung pelaksanaan strategi dalam merencanakan

pembangunan daerah sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan dari dilaksanakannya wujud perencanaan pembangunan yang sesuai di Bappeda Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat memperlihatkan bahwa faktor pendukung keberhasilan Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Merencanakan Pembangunan di Kabupaten Bone lebih mengarah pada sifat (a) Kebijakan Organisasi dan Kebijakan Pembangunan, (b) Potensi dan Produktifitas. Berdasarkan dari keterangan yang dihimpun oleh beberapa informan terkait dengan aspek Kebijakan Organisasi dan Kebijakan Pembangunan dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan organisasi dalam hal kemampuan untuk menjabarkan strategi sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh peraturan Undang-Undang, Peraturan pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai acuan utama dalam merencanakan dan mengevaluasi pembangunan daerah. Sedangkan dalam aspek Kebijakan Pembangunan sudah dilihat dari bagaiman perencanaan pembangunan yang akan diterapkan oleh pemerintah dan memiliki jangka waktu yang telah ditetapkan dan semua itu tidak terlepas dari acuan utama dalam merencanakan pembangunan

yang dikenal dengan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD.

Potensi dan Produktivitas menjadi penunjang motivasi pegawai terhadap jalannya kegiatan administrasi pegawai. Potensi pegawai sangat penting setra kemahiran pegawai dalam bekerjasama secara produktif sehingga dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Produktifitas pegawai menjadi penunjang terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan untuk merencanakan pembangunan yang telah disetujui bersama. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti sebelumnya telah mewawancarai salah seorang informan yang ingin mengulas tentang potensi dan produktifitas pegawai terkait dengan Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini, namun keterangan dari informan yang bersangkutan mengarah pada potensi pegawai dan juga akan dibahas tentang produktifitas pegawai. Berdasarkan dari keterangan yang dihimpun dari beberapa informan terkait dengan aspek potensi dan produktifitas dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa potensi pegawai sudah mampu dalam hal kemahiran dalam bekerjasama secara produktif serta dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam aspek Produktifitas pegawai sudah dilihat dari bagaimana produktifitas

pegawai mampu mewujudkan tujuan yang ditetapkan, namun tidak terlepas dari sedikit kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam aspek ini pegawai selalu dituntut untuk berusaha menciptakan perencanaan pembangunan yang terbaik di Kabupaten Bone.

Peneliti kemudian menganalisa dan menyimpulkan keterangan dari setiap informan terkait dengan faktor pendukung dalam Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah ini terdapat aspek kebijakan organisasi dan kebijakan pembangunan beserta aspek potensi dan produktifitas. Lebih lanjut terkait dengan aspek kebijakan organisasi dan kebijakan pembangunan, bahwa strategi dalam menjabarkan perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah dan memiliki jangka waktu yang telah ditetapkan dan semua itu tidak terlepas dari acuan utama dalam merencanakan pembangunan yang dikenal dengan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD. Sedangkan pada aspek potensi dan produktifitas pegawai ialah salahsatu faktor dihadapkannya strategi perencanaan pembangunan daerah agar dapat dilihat dari kerjasama secara produktif pegawai agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Faktor penghambat merupakan hal-hal yang menjadi penyebabambatnya strategi badan perencanaan pembangunan daerah sehingga menjadi terganggu atau terkendala dan tidak terlaksana secara maksimal. Pemberdayaan SDM sudah dapat bekerja untuk mencapai tujuan pembangunan daerah namun disadari maupun tidak berperan cukup vital didalam terlaksananya suatu strategi perencanaan pembangunan daerah dengan tingkat kebijakan organisasi dengan kebijakan pembangunan serta potensi dan produktifitas yang sangat tinggi namun tidak diimbangi dengan alokasi sumber daya dalam hal Pemberdayaan SDM, maka strategi dalam merencanakan pembangunan daerah menjadi tidak maksimal. Untuk mencapai strategi perencanaan pembangunan daerah yang maksimal tentunya sangat bergantung pada Alokasi Sumber Daya yang dapat dilihat dari Pemberdayaan SDM yang lebih baik. Kurang nya SDM maka tidak memungkinkan untuk berjalannya sebuah kegiatan perencanaan pembangunan daerah yang dapat berjalan dengan baik. Berkaitan dengan pentingnya Pemberdayaan SDM, Berdasarkan keterangan dari beberapa kesimpulan yang dihimpun dari informan diatas maka dengan aspek

pemberdayaan SDM ini dapat disimpulkan bahwa kurangnya sumber daya manusia di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone menjadi hal kelemahan yang sangat krusial karena begitu penting dalam keberlangsungan alokasi sumber daya dalam strategi merencanakan pembangunan daerah.

Sumber daya material dapat disadari bahwa tidak berjalan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana yang diketahui bersama bahwa sumber daya material merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh pemerintah dari usaha dan kerja keras, seperti halnya pembangunan daerah. Dalam pembangunan daerah perlu persiapan yang matang sehingga mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa sumber daya material biasa disebut dengan sesuatu yang dihasilkan atau suatu karya yang dibuat oleh lingkup pemerintah Kabupaten Bone seperti pembangunan daerah dan pengembangan sumber daya alam, pembangunan di Kabupaten Bone juga dinilai belum mencapai tujuan, namun disebutkan diatas bahwa pembangunan daerah membutuhkan waktu yang tidak

sedikit, maka dari itu pembangunan daerah di Kabupaten Bone hingga saat ini masih sedang dalam proses pembangunan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan keterangan dari beberapa kesimpulan yang dihimpun dari informan diatas maka dengan aspek Sumber Daya Material ini dapat disimpulkan bahwa kurangnya sumber daya material yang ada di Kabupaten Bone sehingga banyak kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi, seperti halnya pada pembangunan akses jalan dan pembangunan lapangan kerja yang belum memadai, hal tersebut menyebabkan masyarakat kekurangan perhatian dari pemerintah dan pemerintah dianggap belum mampu menjalankan tugas dengan baik, dalam hal ini tentunya Bappeda sendiri menjadi sasaran untuk merencanakan pembangunan yang merata di Kabupaten Bone sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, dari beberapa hal diatas menjadi acuan bagi pemerintah bahwa masyarakat sangat memerlukan pembangunan yang merata dan masyarakat tentunya ingin melihat Kabupaten Bone kedepannya lebih maju dan menjadi salahsatu daerah yang kaya akan Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Material yang memadai

dalam menunjang pembangunan daerah yang merata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Merencanakan Pembangunan Di Kabupaten Bone adalah sebagai berikut : Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Merencanakan Pembangunan di Kabupaten Bone secara umum strategi yang digunakan sudah cukup baik, terlepas dari beberapa kekurangan yang ada dalam proses strategi yang digunakan tentunya perlu ditingkatkan. Hal tersebut ditinjau dari segi potensi pegawai dalam membuat dokumen perencanaan, kedisiplinan, kapasitas dan komitmen dalam bekerja sama untuk merencanakan pembangunan daerah yang merata.

Faktor pendukung Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bone adalah unsur (a) Kebijakan Organisasi dan Kebijakan Pembangunan dikarenakan dapat menjadi penunjang kemampuan dalam menjabarkan strategi dan akan mendorong tingkatan kinerja dalam merencanakan pembangunan di Kabupaten Bone sesuai dengan

peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan. (b) Potensi dan Produktifitas pegawai sangat penting bagi sistem pemerintahan yang berdasarkan kepercayaan. Potensi dan Produktifitas yang dimiliki pegawai menjadi suatu acuan utama dalam merencanakan suatu program pembangunan yang ada di Kabupaten Bone. Sedangkan yang menjadi Faktor Penghambat ialah (a) Pemberdayaan SDM yang masih kurang dalam hal jumlah pegawai yang masih terbatas di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone. (b) Sumber Daya Material yang masih kurang dalam hal perencanaan program pemangunan daerah, sehingga sumber daya material yang masih belum mempunyai sangat berperan sehingga masih sedikit kurang terwujudnya strategi dalam merencanakan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andyastuti, 2013. *Pengaruh, pelayanan, pemeriksaan dan perpajakan indonesia*
- Dwiyanto, 2011. *Mengembalikan kepercayaan publik, melalui reformasi birokrasi.* Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Gani, Ahmad, 2009. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pegawai.* Bandung: Remaja Rosdakarya
- Lukman, sampara, 2000. *Manajemen kualitas pelayanan.* Jakarta: STIALAN Press
- Moenir.a, A.S, 2002. *Manajemen pelayanan umum di indonesia.* Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Rahayu, 2010. *Perpajakan indonesia (konsep dan aspek formal).* Yogyakarta: Graha Ilmu
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Pajak
- Lukman, Sampara, 2002, Edisi Kedua :Manajemen Kualitas Pelayanan. Jakarta, STIA LAN Press.
- Sedarmayanti, 2010, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja , cetakan kedua, penerbit: Mandar Maju. Bandung
- Siagian, 2009. *Administrasi Pembangunan (konsep, dimensi dan strateginya).* Jakarta: Raneka Cipta
- Supadmi, 2009. *Konsep dasar perpajakan.* Jakarta: SalembaEmpat